



RENCANA KERJA

PELABUHAN PERIKANAN

NUSANTARA TANJUNGPANDAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2026” dapat diselesaikan dengan baik.

RKT merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT merupakan dokumen kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja. RKT Tahun 2026 berpedoman dari Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025-2029.

Ucapan terima kasih dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen RKT ini. Semoga perikanan tangkap Indonesia semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Tanjungpandan, 24 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Tanjungpandan



Arif Usman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Visi Misi	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Dasar Hukum	8
1.5 Sasaran Kegiatan	9
BAB II INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	11
2.1 Target Kinerja	11
2.2 Kerangka Pendanaan	12
2.3 Rencana pencapaian Target Kinerja	13
BAB III PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2026	11
Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”, dengan (1) peningkatan kualitas manusia, melalui peningkatan daya saing SDM KP dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, (3) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, (4) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan bersifat indikatif. RPJMN 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025 - 2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2025 - 2029.

RPJMN 2020-2025 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara – negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2025 - 2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan dalam 8

(delapan) Misi yang dikenal sebagai Astacita, yaitu: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, dan (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Untuk itu pembangunan kelautan dan perikanan 2025 - 2029 mengacu kepada agenda pembangunan nasional agar dapat memberikan perandan kontribusi dalam meningkatkan daya saing, pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2025 - 2029 sebagai amanah dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu program pembangunan perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program DJPT, PPN Tanjungpandan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh PPN Tanjungpandan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026.

1.2 Visi Misi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap, yaitu: Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan; Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; Mengakselerasi reformasi tata Kelola dan perizinan usaha perikanan tangkap;
3. Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Pelabuhan Perikanan melaksanakan misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan modal bagi nelayan;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dengan menyediakan kualitas hasil tangkapan yang memenuhi standar mutu, mewujudkan konektivitas/jejaring antar Pelabuhan perikanan dalam rangka menjamis ketersediaan pasokan ikan, serta fasilitasi pelaksanaan revitalisasi industri perikanan tangkap dan penyediaan serta pemanfaatan infrastruktur/fasilitas Pelabuhan perikanan untuk menyongsong revolusi industri 4.0;

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan. Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, maka untuk itu diperukan rencana kerja yang sistematis sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

1.3 Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 PPN Tanjungpandan adalah sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program/kegiatan tahun 2026 mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi program/kegiatan.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37)
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1687).

1.5 Sasaran Kegiatan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

1. **Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan**” dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;

2. **Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan meningkat**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”**, dengan Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan;
3. **Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang optimal dan bertanggung jawab**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”**, dengan Indikator Kinerja: Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan”; Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.
4. **Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”** dengan Indikator Kinerja: Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan;
5. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan Indikator Kinerja : Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan; dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

2.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan berupa sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan serta *cascading* dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	1.	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp. Juta)	1.512,74
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Meningkat	2.	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)	3.572,36
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3.	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	100
		4.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	88
		5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	27,91
		6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	85
		7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	33
4.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan	8.	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	1.418

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	9.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	10.	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	75,5
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	86
		12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	88,2
		13.	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)	84,5
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	77
		15.	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	82
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	92,1
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	71,75
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	88,8

2.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target setiap sasaran strategis, PPN Tanjungpandan telah merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Tahun 2026, kegiatan PPN Tanjungpandan terbagi dalam lima output kegiatan utama, yaitu:

Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT		PAGU/TARGET (Rp)
1	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		400.124.000
		2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	400.124.000
5	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		9.540.190.000
		2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	157.920.000
		2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.152.263.000
		2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	46.234.000
		2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	183.773.000

2.3 Rencana pencapaian Target Kinerja

- Sasaran Kegiatan (SK-1): Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dengan Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Indikator Nilai PNBP merupakan penerimaan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan oleh PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi Nilai PNBP PPN Tanjungpandan diukur dan dilaporkan berkala secara triwulan. Target 2026 sebesar Rp 1.512,74Juta;
- Sasaran Kegiatan (SK-2): Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Indikator ini merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dengan pelaporan bersifat triwulan dan penghitungan bersifat nilai posisi akhir. Target 2026 sebesar 3.572,36 Ton;
- Sasaran Kegiatan (SK-3) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator kinerja ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator penilaian, yaitu 1) Hasil analisa kesesuaian permohonan pengusahaan terhadap usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan /atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan x 80%; 2) Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang

terstandardisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20%. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target 2026 sebesar 100%.

b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2018). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi: 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri. Pengukuran capaian bersifat triwulan dengan target tahun 2026 sebesar 88.

c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini menunjukkan 1) Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%); 2) Jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%); 3) Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Pengukuran bersifat tahunan dengan target 27,91%.

d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pengembangan fasilitas eksisting (ha) dibandingkan dengan luas pelabuhan perikanan sesuai dengan master plan (ha) x 100%. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, dengan target tahun 2026 sebesar 85%.

e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Penilaian Indikator Kinerja ini berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). Penghitungan bersifat triwulan dengan target 33.

4. Sasaran Kegiatan (SK-4) Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (Sertifikat Kelaikan Kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Penghitungan capaian bersifat triwulan dengan nilai posisi akhir. Target tahun 2026 sebesar 1.418 kapal yang dihitung secara kumulatif terhadap

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh PPN Tanjungpandan sejak tahun 2023 s.d. 2026.

b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Target dari indikator ini pada tahun 2026 adalah 0,28 atau minimal berpredikat Cukup.

5. Sasaran Kegiatan (SK-5) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, dengan indikator kinerja:

a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini merupakan indikator nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil Serta mengacu kepa Junks Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Data Dukung berupa lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan di unit kerja. Target indikator kinerja ini sebesar 75,5.

b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat bulanan dengan target 86%.

c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan

ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Target nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan tahun 2026 adalah 88,2 dengan periode pengukuran tahunan.

- d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester dengan target 84,5.
- e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 77.
- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Target Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan pada tahun 2026 adalah 76 dengan periode pengukuran triwulan.
- g. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan persentase pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%)

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN kerja Perikanan Nusantara Tanjungpandan adalah 82 dengan periode pengukuran adalah tahunan.

h. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat semester dengan target tahun 2026 sebesar 92,1.

i. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi MONEV KEMENKEU. Target indikator ini pada tahun 2026 adalah sebesar 71,75 dengan periode pelaporan adalah tahunan.

- j. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Survei Kepuasan Masyarakat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dengan target tahun 2026 sebesar 88,8.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis untuk meningkatkan PPN Tanjungpandan yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini PPN Tanjungpandan akan lebih mudah dalam melaksanakan pengelolaan program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di PPN Tanjungpandan dengan baik dan terencana.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MATRIKS STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR	KEGIATAN
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp Juta)	Tersedianya laporan hasil validasi, monitoring dan evaluasi capaian PNBP non SDA	Data penerimaan PNBP Non SDA yang tervalidasi
2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)	Tersedianya data dan statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Data dan statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang tervalidasi
3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Tersedianya data perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	Permohonan perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang di analisa dan dievaluasi
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di pelabuhan perikanan
		Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi tata kelola sarana dan prasarana pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Monitoring dan evaluasi tata kelola sarana dan prasarana pada Pelabuhan Perikanan sesuai dengan ketentuan
		Tersedianya hasil evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait pelayanan usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Pelayanan publik terkait pelayanan usaha di pelabuhan perikanan yang dievaluasi

4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	Tersusunnya hasil evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Evaluasi kinerja pelabuhan perikanan sesuai dengan indikator kinerja pelabuhan perikanan
		Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait operasional pelabuhan
		Tersedianya data mutu perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Data hasil pengujian mutu di pelabuhan perikanan
		Terinformasikannya data perkembangan operasional pelabuhan perikanan	Data dalam bentuk visual dan non visual terkait perkembangan operasional di pelabuhan perikanan
		Tersedianya hasil evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait operasional Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Laporan tindak lanjut hasil penilaian SKM operasional Pelabuhan Perikanan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Tersedianya Dokumen STBLKK sesuai ketentuan	Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya Dokumen PB sesuai ketentuan	Penerbitan Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya Dokumen SHTI sesuai ketentuan	Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya laporan Analisa, Monitoring dan Evaluasi kesyahbandaran	Laporan Analisa, monitoring dan evaluasi kesyahbandaran pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya laporan tindak lanjut hasil penilaian SKM kesyahbandaran	Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya data hasil pencatatan keberadaan kapal	Tersedianya laporan hasil pengaturan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

		Tersedianya data hasil verifikasi pelaporan data E Log Book penangkapan ikan	Terlaksananya pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya daftar hasil pengawasan pengisian BBM	Terlaksananya pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersusunnya hasil rekapitulasi data PKL	Memfasilitasi Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan di di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya dokumen surat keterangan olah gerak kapal/Pembebasan SPB	Terlaksananya Pengaturan olah gerak kapal perikanan/pembebasan SPB
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Tersedianya data dan informasi hasil pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan	Data/informasi penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	Tersusunnya hasil pengawasan dan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan	Data/informasi pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan
8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	Jumlah pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang sesuai ketentuan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	"Terlaksananya kepatuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan	Nilai Kepatuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan
10	Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Tersedianya bahan penilaian Pembangunan ZI WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Bahan penilaian Pembangunan ZI WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sesuai dengann ketentuan

	(WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	Tersedianya laporan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Tersedianya dokumen penyelesaian tindak lanjut temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang tersusun sesuai ketentuan
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	Terselenggaranya Pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan	Dokumen Pengelolaan Kinerja sesuai ketentuan
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Indeks)	Tersedianya dokumen pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya dokumen usulan manajemen ASN	Pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersusunnya dokumen terkait organisasi dan tata laksana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Dokumen organisasi dan tata laksana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Tersediannya dokumen Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Dokumen Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
15	6. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Tersedianya Laporan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Laporan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
		Tersedianya laporan urusan kerumahtanggaan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Laporan kegiatan kerumahtanggaan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	"Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran *disesuaikan IKI Mandatory"	Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	Tersedianya dokumen kinerja perencanaan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Data kinerja perencanaan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan sesuai ketentuan
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	Tersedianya dokumen pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

RENCANA AKSI

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNGPANDAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Unit PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Rp, Juta)	Tim Kerja TKPU	RO Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)	107.886.000	2	Lembaga												
					SUB KOMPONEN A. Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan	8.953.000	12	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SUB KOMPONEN B. Operasional Pelayanan PNBP	49.473.000	12	Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SUB KOMPONEN D. Re-Sertifikasi ISO 37001-2016 (Manajemen Anti Penyuapan)	49.460.000	12	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan Meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Ton)	Timja Operasional Pelabuhan	RO Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.057)	33.365.000	2	Lembaga	2											
					SUB KOMPONEN A. Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	5.998.000	12	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

					SUB KOMPONEN C. Koordinasi Lintas Sektor di PPN Tanjungpandan	2.660.000	12	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					RO Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan (2338,BGA,002,052)	3.793.000	2	Lembaga	2											
					SUB KOMPONEN A. Pengelolaan dan Operasional Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	3.793.000	12	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Nusantara Tanjungpandan yang Optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Tim Kerja TKPU	RO Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)	69.122.000	2	Lembaga	2											
		7	Persentase Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Nilai)	Tim Kerja TKPU	SUB KOMPONEN A. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan	31.413.000	12	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					SUB KOMPONEN B. Penanganan Sampah Laut (PSL) dan limbah di kawasan pelabuhan perikanan	37.709.000	12	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--

[illegible]

					SUB KOMPONEN D. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	162.560.000	12	Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (Persen)	Timja Dukungan Manajerial	RO Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342.CAN.955.051)	82.709.000	1	Unit													1
					SUB KOMPONEN A. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	82.709.000	1	Unit									1				
					RO Pengadaan sarana perkantoran (2342.EBB.951.051)	23.117.000	1	Unit, M2, Paket													1
					SUB KOMPONEN A. Layanan Sarana Internal	23.117.000	1	Unit									1				

					ROLayanan Prasarana Internal(2342.EBB.971.051)	91.886.000	1	Unit, M2, Paket												
					SUB KOMPONEN A. Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	91.886.000	1	Unit									1			

Rincian Target Indikator
Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TIMJA	KETERANGAN	TARGET				PERIODE PELAPORAN	TARGET PERIODIK 2026			
				2023	2024	2025	2026		S.D. TW I	S.D. TW II	S.D. TW III	S.D. TW IV
1	Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Tanjungpandan (Rp juta)	TKPU	Formula perhitungan Sama dengan tahun lalu	1679,68	1835,6	1.849.720.000	1.512.741.000	triwulan	378.185.250	756.370.500	1.134.555.750	1.512.741.000
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Tanjungpandan (ton)	OP	Formula perhitungan Sama dengan tahun lalu	3250	3496	3.297.963	3.572.360	triwulan	742,84	1.613,89	2.567,72	3.572,36
3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Tanjungpandan (persen)	TKPU	Formula perhitungan Sama dengan tahun lalu	100	100	100	100	tahunan				
4	Tingkat Kinerja PPN Tanjungpandan (nilai)	OP	Penentuan target berdasarkan capaian tahun sebelumnya Jika tercapai kategori Sangat Baik, maka target min. 87 Jika tercapai kategori Baik, maka target min. 66	83	84	87	88	triwulan	88	88	88	88

5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Tanjungpandan (persen)	KESYAHBANDARAN	Minimal sama dengan tahun lalu/naik sedikit	27	27,21	27,21	27,91	tahunan				
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Tanjungpandan (persen)	TKPU	Target kemungkinan sama atau naik hanya sedikit sekali	30	80	80	85	tahunan				
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tanjungpandan (nilai)	TKPU	Formula perhitungan Sama dengan tahun lalu	30,01	30,1	30,1	33	triwulan	33	33	33	33
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	KESYAHBANDARAN	Target ditentukan oleh masing-masing UPT, kemungkinan kenaikannya tidak banyak	50	40	40	60	triwulan	1.373	1.388	1.403	1.418
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	KESYAHBANDARAN	IKU baru	-	-	0,26	0,28	semester		0,28		0,28
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan (nilai)	DUKMAN	Formula perhitungan sama dengan tahun lalu	Belum ada di 2023	80	75,5	75,5	tahunan				
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Tanjungpandan (persen)	DUKMAN	Formula perhitungan sama dengan tahun lalu	75	80	85	86	triwulan	86	86	86	86

12	Nilai PM SAKIP PPN Tanjungpandan (nilai)	DUKMAN	IKU baru	Belum ada di 2023	Belum ada di 2024	88	88,2	tahunan				
13	Indeks Profesionalitas ASN di PPN Tanjungpandan (indeks)	DUKMAN	Formula perhitungan sama dengan tahun lalu	79	84	87	84,5	semester		82		84,5
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Tanjungpandan (persen)	DUKMAN	IKU baru	Belum ada di 2023	Belum ada di 2024	76	77	triwulanan	77	77	77	77
15	Persentase Pengelolaan BMN di PPN Tanjungpandan (persen)	DUKMAN	IKU perubahan	Belum ada di 2023	Belum ada di 2024	81	82	Tahunan				
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Tanjungpandan (nilai)	DUKMAN	Formula perhitungan sama dengan tahun lalu	93,75	93,76	92	92,1	semester		85,0		92,1
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Tanjungpandan (nilai)	DUKMAN	Formula perhitungan sama dengan tahun lalu	Belum ada di 2023	71	71,5	71,75	Tahunan				

18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Tanjungpandan (nilai)	DUKMAN	Formula perhitungan sama dengan tahun lalu	88,21	88,3	88,5	88,8	Triwulan	88,8	88,8	88,8	88,8
----	--	--------	--	-------	------	------	------	----------	------	------	------	------